

**ARNARKISME DEMONSTRASI MAHASISWA**

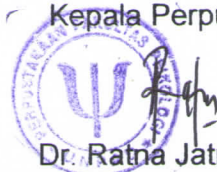
**Oleh :**  
**Dr. Zainal Abidin, M.Si**



**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG, FEBRUARI 2010**

TELAH DICATAT/DIDOKUMENTASIKAN PADA  
PERPUSTAKAAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Kepala Perpustakaan



Dr. Ratna Jatnika, MT  
NIP. 19632021988032003

Telah diperiksa oleh :  
Guru Besar/Dosen Senior



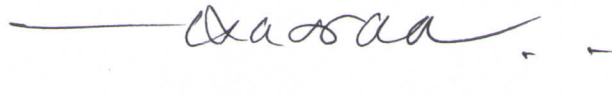
Prof. Dr. Hj. Kusdiratri Setyono

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Hj. Juke Roosjati Siregar, M.Pd  
NIP. 1947111819032001

**KETUA BAGIAN PSIKOLOGI KLINIS**



Drs. H. Hatta Albanik, M.Psi  
NIP. 194705121981031001

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Hj. Juke Roosjati Siregar, M.Pd  
NIP. 1947111819032001

Terdaftar di Perpustakaan  
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran



## **Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa**

Oleh:

Dr. Zainal Abidin

Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

Artikel ini merupakan hasil kajian mengenai anarkisme yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan demonstrasi. Akhir-akhir ini ada kecenderungan yang teramati pada mahasiswa yang melakukan demonstrasi, yaitu mereka melakukannya secara anarkis, misalnya melakukan pengrusakan barang milik publik/institusi, penyerangan terhadap petugas keamanan, penyerangan terhadap pejabat pemerintah, dan aksi-aksi violent dan anarkis lain. Apa pun isu dalam demonstrasi mereka (entah mengenai penolakan kenaikan SPP maupun isu-isu lokal seperti pemekaran wilayah, dan isu-isu nasional seperti pemberantasan korupsi) tidak jarang disertai kekerasan dan anarkisme. Mengingat anarkisme mereka sudah meluas ke berbagai wilayah di Indonesia (Jakarta, Bandung, Medan, Makasar, dll.), maka perlu penjelasan ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan mengajukan rekomendasi penanggukangannya. Artikel ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan itu. Penulis melakukan kajian berdasarkan teori-teori psikologi sosial tentang kekerasan dan aksi-aksi massa. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengurangi dan menghilangkan anarkisme mahasiswa dalam berdemonstrasi.

### **Pendahuluan**

Mahasiswa Indonesia adalah sumber daya manusia Indonesia potensial yang diharapkan mampu memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang maju, beradab, dan kompetitif. Tujuan ideal penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi pada umumnya diarahkan untuk mendidik dan mencerdaskan generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk mencapai harapan itu.

Akan tetapi, faktanya sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mahasiswa bukan komponen bangsa yang pasif. Sebagian dari mereka selalu terlibat aktif dalam berbagai gerakan

sosial dan memberi warna yang kuat pada sejarah politik dan sosial di Indonesia. Mereka adalah komponen bangsa yang sangat kritis. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa memberi kontribusi besar dalam meruntuhkan rezim-rezim otoriter seperti Orde Lama dan Orde Baru, di samping sangat kritis terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintahan dewasa ini.

Sayangnya, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa akhir-akhir ini sering bersifat anarkis. Anarkisme mahasiswa kini seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Ada anggapan pada sebagian mahasiswa bahwa anarkisme dan kekerasan merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan dari aksi-aksi mereka.

Kecenderungan ini sebetulnya sudah dimulai dari gerakan mahasiswa tahun 1998. Keberhasilan aksi-aksi mahasiswa dalam menumbangkan Rezim Orde Baru bulan Mei 1998 sebagian karena aksi-aksi anarkis, keras, dan nekad yang dilakukan oleh mahasiswa. Kekenakan dan kekerasan mereka melawan tentara dan polisi (yang dianggap pro pemerintah) menjadi salah satu alasan mundurnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan.

Beralihnya kekuasaan Orde Baru ke Orde Reformasi paska tahun 1998 tidak menyurutkan aksi-aksi keras dan anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebaliknya, mahasiswa semakin keras dan terkadang berlebihan dalam demonstrasi-demonstrasinya. Mahasiswa sering melakukan provokasi terhadap polisi, memancing reaksi emosional para petugas keamanan di lapangan. Konon, memang itulah cara yang harus mereka lakukan. Bagi mereka, kalaulah akan ada korban dalam aksi-aksi keras tersebut, hal itu tidak seberapa penting dibandingkan hasil yang mungkin akan mereka raih sebagai kompensasinya.

Anarkisme dalam demonstrasi mahasiswa dewasa ini telah menimbulkan korban bukan hanya jiwa manusia, tetapi juga harta benda. Anarkisme mahasiswa telah meminta korban jiwa



di Medan (Sumatera Utara), di Makasar (Sulawesi selatan), dan di beberapa daerah lain di Indonesia. Namun, kerugian harta benda dan fasilitas umum (kantor pemerintahan, kampus, dan lain-lain) yang sebetulnya sangat penting untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat pun tidak terhitung jumlahnya. Akibatnya, citra demonstrasi mahasiswa kini tidak lagi memiliki nilai positif dalam perspektif masyarakat, melainkan citra negatif karena dinilai mengganggu ketertiban umum

### **Kenapa terjadi anarkisme dalam demonstrasi mahasiswa?**

Secara teoritik anarkisme dalam demonstrasi mahasiswa dapat dijelaskan melalui teori-teori psikologi, khususnya psikologi sosial. Berikut ini akan dideskripsikan secara teoritis beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan anarkisme dan kekerasan mahasiswa sebagaimana dikemukakan oleh beberapa teori psikologi tentang kekerasan kolektif. Teori-teori tersebut, menurut pendapat kami, cukup relevan untuk menjelaskan kasus-kasus kekerasan dan anarkisme di kalangan mahasiswa di Indonesia.

#### **1. Persepsi terhadap adanya pelanggaran norma**

Menurut *Social Interactionist Theory of Coercive Action (SITCA)* dalam kehidupan sosial banyak sekali kasus kekerasan yang didorong oleh persepsi pelaku (*perpetrator*) terhadap pelanggaran norma (*perceived norm violation*) atau terhadap pelanggaran prinsip keadilan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu (Tedeshi & Felson, 1994). Para pelaku mempersepsi adanya pelanggaran norma atau keadilan yang dilakukan oleh orang atau institusi tertentu, dan mereka melakukan

kekerasan terhadap pelanggar norma tersebut sebagai upaya untuk memberi hukuman atau menegakkan keadilan.

Persepsi terhadap adanya pelanggaran menyebabkan sejumlah orang mengalami *grievance*. *Grievance* adalah pengalaman tidak menyenangkan yang dihayati oleh individu dan kelompok individu sebagai akibat dari persepsinya bahwa orang, kelompok, atau institusi lain telah melanggar norma atau melakukan tindakan yang tidak adil, misalnya dalam bentuk korupsi yang merugikan negara, tindakan a-moral, kejahatan, dll. Pengalaman ini bisa mempengaruhi emosi (marah) sejumlah orang (antara lain mahasiswa) dan memotivasinya untuk menegakkan keadilan. Jika mereka mempertimbangkan besarnya nilai yang diharapkan dan rendahnya biaya atau risiko yang harus dikorbankan, maka besar kemungkinan mereka akan melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan *grievance* itu. Semakin sering dan intens pelanggaran dilakukan, semakin keras hukuman diberikan kepada pelanggar norma tersebut. Misalnya: Semakin korup dan incapable pemegang otoritas (pemerintah, rektorat), semakin keras demonstrasi dilakukan.

## **2. Perceived Law enforcement**

Menurut Black (1983), Tedeshi and Felson (1996), dan Abidin (2005) kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum, termasuk kekerasan anarkisme mahasiswa, dipengaruhi oleh persepsi mereka penegakan hukum. Jika mahasiswa percaya bahwa melakukan kekerasan tidak akan mendapatkan hukuman, maka mereka akan cenderung menggunakan kekerasan untuk

memperjuangkan kepentingannya. Lemahnya penegakan hukum dari pihak rektorat dan aparat penegak hukum (kepolisian, pengadilan) terhadap para pelaku kekerasan di kalangan mahasiswa, akan menjadi pendorong untuk melakukan kekerasan yang sama di masa depan.

### 3. Mob identification

Menurut Reicher (1996), ketika orang berada dalam mob atau kerumunan yang emosional (misalnya, ketika terjadi demonstrasi), maka kemungkinan untuk melakukan kekerasan sangat tinggi. Ini dimungkinkan karena setiap orang menghayati dirinya sebagai bagian dari massa (mob identity), bukan lagi sebagai bagian dari individu (self identity).

Dalam kondisi ini orang-orang yang berada dalam kerumunan kemungkinan besar akan saling menularkan emosi dan tingkah laku. Akibatnya, jika ada seseorang melakukan kekerasan atau berteriak untuk melakukan kekerasan, maka aksi kekerasan sulit untuk dihindari.

Kemungkinan terjadinya kekerasan dalam mob diperkuat oleh peran pemimpin (Young, 1956). Pemimpin dalam mob biasanya memiliki fungsi sbb:

- a. Memberi fokus pada *mob* sehingga mampu menyatukan anggota *mob* baik dalam ruang maupun dalam atensi.
- b. Memverbalisasikan sikap dan perasaan yang tidak jelas yang *dialami* oleh orang-orang yang berada dalam *mob* melalui simbol-simbol komunikatif yang diucapkan berulang-ulang, yang berfungsi sebagai stimulator untuk beraksi



- c. Menghidupkan kebencian, ketakutan, dan dorongan-dorongan dasar yang semula bentuknya masih samar-samar dengan cara menggunakan mite, legenda, dan peristiwa-peristiwa aktual saat itu untuk membangkitkan emosi dan memicu aksi-aksi para partisipan.
- d. Memberi arah pada aksi-aksi massa, misalnya dengan cara mendorong dan menganjurkan untuk melakukan serangan, pemukulan, pembakaran, dan bentuk-bentuk aksi kekerasan lainnya.
- e. Meski dalam banyak kasus pemimpin hanya memberikan agitasi verbal, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka ikut melakukan aksi secara langsung.

#### **4. Proses belajar sosial**

Menurut Social learning theory, manusia cenderung meniru tingkahlaku orang-orang lain, terutama tingkahlaku yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya atau dianggap sebagai pemecahan masalah yang efisien (Bandura, 1973). Penayangan televisi dan pemberitaan media cetak tentang aksi kekerasan yang terjadi ditempat lain (khususnya di Jakarta pada masa-masa akhir runtuhnya pemerintahan Orde Baru), mungkin saja menyebabkan terjadinya peniruan tingkahlaku itu oleh para mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia. Di samping itu, observasi langsung para pelaku kekerasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh kakak-kakak angkatan mereka di tahun-tahun sebelumnya, kemudian ditiru oleh mereka pada saat ini karena dianggap sebagai aksi yang efektif dalam memecahkan suatu masalah.

Proses belajar seperti itu dimungkinkan karena pengaruh penguatan (reinforcement), baik berupa tiadanya hukuman (punishment) maupun ganjaran (reward). Jika mahasiswa mengobservasi bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh kakak-kakak angkatan mereka tidak mendapatkan hukuman (baik oleh rekotorat maupun kepolisian), melainkan justru ganjaran (misalnya pujian dari masyarakat), maka aksi yang sama akan dilakukan oleh mereka di masa sekarang dan akan datang.

## 5. Relative deprivation

Menurut relative deprivation theory, kekerasan kolektif dapat disebabkan oleh adanya deprivasi (perasaan tidak puas atau perasaan adanya perlakuan tidak adil) yang dialami oleh para pelaku kekerasan massal (Gurr, 1974). Sumber dari deprivasi adalah persepsi terhadap adanya kesenjangan atau diskrepansi antara harapan (*value expectations*) dan kenyataan (*value capabilities*). Jika perasaan ini dibiarkan terlalu lama, dan ada pembenaran normatif yang mendukungnya, maka dapat mendorong sekelompok orang untuk melakukan kekerasan yang bersifat massal (kolektif).

Misalnya, perubahan pemerintahan, sosial, politik, dan ekonomi yang berlangsung dalam suatu masyarakat atau negara akan mendorong tingkat dan intensitas harapan (ekspektasi) warganya dalam hal perbaikan kehidupan ekonomi, keamanan, kualitas sosial, kebebasan, dll. Akan tetapi, jika harapan tersebut tidak disertai kenyataan, maka intensitas ketidakpuasan (*discontent*) akan lebih meningkat daripada sebelum terjadinya perubahan. Jika hal ini terjadi, maka para anggota kelompok (masyarakat) tertentu akan menyalurkan perasaan deprivasi mereka dalam

bentuk kekerasan kolektif. Ia menulis, "*Widespread discontent provides a general impetus to collective violence*". (Gurr, 1974, h. 13).

Teori Gurr di atas boleh jadi dapat menjelaskan maraknya gejala kekerasan di kalangan mahasiswa Pasca Orde Baru (setelah tahun 1998) di Indonesia. Setelah Orde Reformasi memegang kendali pemerintahan, maka ekspektasi mahasiswa akan perbaikan sosial, politik, hukum, pemerintahan, dan pemberantasan korupsi, semakin meningkat dibandingkan dengan pada masa pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi, karena tidak disertai oleh kemampuan Pemerintah Orde Reformasi menciptakan kenyataan itu, maka meningkat pula intensitas *discontent* mahasiswa. Salah satu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh mereka adalah anarkisme dan kekerasan kolektif, termasuk demonstrasi yang disertai kekerasan.

## **Kesimpulan**

Dari paparan di atas tampak dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat lima variabel yang mendorong mahasiswa melakukan demonstrasi anarkis. Pertama, mahasiswa mempersepsi bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran norma, misalnya dalam bentuk perilaku yang merugikan negara (korupsi, kolusi, nepotisme, dll). Kedua, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dinilai oleh mahasiswa tidak serius dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga mahasiswa terdorong untuk menegakkan hukum sendiri di jalanan. Ketiga, ada kekecewaan yang sangat kuat dalam jiwa para mahasiswa, akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk mengalami hidup lebih baik di paska reformasi, tetapi kenyataannya justru kehidupan sosial, politik, dan ekonomi menurun. Keempat, secara

langsung maupun tidak langsung mahasiswa belajar bahwa demonstrasi yang anarkis lebih efektif dibandingkan demonstrasi damai. Kelima, pada saat mahasiswa melakukan demonstrasi, mereka mengalami mob identification sehingga ketika ada pemicu, maka dorongan untuk melakukan kekerasan jadi begitu kuat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2005). *Penghakiman Massa. Kajian atas Kasus dan Pelaku*. Jakarta: Accompli
- Bandura, A. (1973). *Aggression. A social learning analysis*. Englecliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Barkan, S.E. & Snowden, L.L. (2001). *Collective Violence*. Boston: Allyn and Bacon.
- Blumer, H. (1970). Outline of collective behavior. In Robert E. Evans, *Readings in collective behavior*. Chicago: Rand McNally & Co., p.65-88.
- Christie, D.J., Wagner, R.V., & Winter, D.W. (eds.) (2001). *Peace, conflict, & Violence*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Colman, A.M. (1991). Crowd psychology in South African murder trials. *American Psychologist*. October, vol.46, No.10, 1071-1079.
- Colombijn, Freek, (2002). "maling, maling!" *The lynching of petty criminals*. In Freek Colombijn & J. Thomas Linbald. *Roots of Violence in Indonesia. Contemporary violence in historical perspective*. Leiden: KITLV Press.
- DiRenzo, G.J. (1990). *Human social behavior: Concepts and principles of sociology*. Forth Worth: Holt, Rinehart and Windston.
- Evans, R.E. (ed.) (1970). *Readings in collective behavior*. Chicago: Rand Menally & Co.
- Galtung, J. & Tschudi, F. (2001). "Crafting peace: On the psychology of transcend approach". In Christie, D.J., Wagner, R.V., & Winter, D.W. (eds.) (2001). *Peace, conflict, & Violence*. New Jersey: Prentice-Hall, p.210-222.
- Gurr, T.B. (1974, fourth printing). *Why men rebel*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Hall, H.V. & Whitaker, L.C. (1999). *Collective violence. Effective strategies for assessing and interviewing in fatal group and institutional aggression*. Boca Raton: CRC Press.
- Klandermans, B. (1997). *The social psychology of protest*. Oxford, England: Basil Blackwell.
- Krahe, B. (2001). *The social psychology of aggression*. East Sussex: Psychology Press. Ltd.
- LeBon, G. (1999). *The crowd*. (3<sup>rd</sup> printing). New Jersey:: Transaction Publishers. (Original work published 1895).

- Madden, D. & Barron, P. (2002). "Violence & Conflict Resolution in 'non-conflict' region: The case of Lampung, Indonesia". The report for the World Bank
- Milgram, S & Toch, H. (1969). "Collective behavior: Crowds and social movement", in Lindzey, G. & Aronson, E. (eds.), *The handbook of social psychology* (second edition), Massachusetts: Addison-Wesley Publ. Co.
- Nitibaskara, Tb. R. (2001). *Ketika kejahatan berdaulat. Sebuah pendekatan kriminologi, hukum, dan sosiologi*. Jakarta: Peradaban.
- Nordholt, HS. (2002). Geneologi kekerasan. *Jurnal demokrasi dan HAM*, Vol.2, No.1, Februari – Mei, 80-109.
- Postmes, T & Spears, R. (1998). Deindividuation and antinormative behavior: Meta-analysis. *Psychological Bulletin*, vol.123, no.3, 238-259.
- Reicher, S. (1996). The crowd century: reconciling practical success with theoretical failure. *British Journal of Social psychology*, 35, 535-553.
- Reicher, S., Levine, R.M., & Gordijn, E. (1998). "More on deindividuation, power relations between groups and the expression of social identity: Three studies on the effects of visibility to the in-group." *British Journal of Social psychology*. 37, 15-40.
- Tajfel, H. (1982). *Social identity and intergroup relation*. London. Cambridge University Press.
- Turner, J.C. & Giles, H. (eds.) (1985). *Intergroup behavior*, Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Turner, J.C. (1999). Some current issues in research on social identity and self-categorization theory. In Ellemers, Spears, & Doosje (eds.) *Social identity, context, commitment, & content*. Massachusetts, Blackwell Publ. Inc.
- Turner R.H. & Killian, L.M. (1972). *Collective behavior*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Zimbardo, P.G., Haney, C., & Banks, W.C. (1973). A Study of prisoners and guards in a simulated prisons. In P.Banyard & A.Grayson (eds.), (2000) (second edition). *Introducing Psychological Research*. New York: Palgrave.